

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, demikian definisi pendidikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia terhadap pendidikan perlu diusahakan terencana, termasuk didalamnya dalam rencana administrasi keuangan untuk pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan rencana strategis oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang digunakan sebagai petunjuk atau gagasan dalam mengambil kebijakan terkait bidang pendidikan.

Revitalisasi tugas komite sekolah dilakukan oleh kemendiknas dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong, sehingga digantinya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Melihat kondisi satuan pendidikan satau sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik yang dihas ilkan oleh sekolah tersebut, sering sekali menjadi alasan untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini Wali Murid untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan. Terkait pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa "pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau Orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar". Sesungguhnya tidak ada larangan untuk melakukan pungutan atau sumbangan yang bersumber dari masyarakat dalam hal ini peserta didik atau orang tua/wali selama syarat dan

ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Maka penting dalam menyusun kebijakan tersebut melibatkan masyarakat dalam hal ini orang tua/wali.

Sekolah adalah organisasi yang bergerak dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sekitarnya. Selain proses belajar mengajar yang terjadi pada sekolah, terdapat juga aktivitas lain, yaitu proses administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan yang dimaksudkan untuk tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan data keuangan biaya pendidikan yang dibayar peserta didik setiap bulannya, atau administrasi lain yang harus dibayarkan oleh orangtua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan atau sekolah.

Konsep pembiayaan pendidikan dibagi menjadi dua hal, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per peserta didik. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun ajaran. Biaya satuan per peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar yang akan dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) adalah yang dikenakan kepada wajib bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Wajib bayar adalah orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua tiri atau orang tua wali yang mengikuti pendidikan di sekolah, dibayar secara bulanan selama 12 bulan dalam satu tahun ajaran. Besarnya uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tidak didasarkan atas kemampuan wajib bayar secara perseorangan tetapi kemampuan rata-rata wajib bayar dan dinyatakan dalam bentuk kategori pungutan.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan manusia untuk bertukar informasi dalam jarak jauh seperti antar desa, kota, provinsi, negara maupun benua. Suatu instansi atau organisasi sangat membutuhkan pengamanan dalam melindungi aset-aset yang ada di dalamnya, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu sehari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan oranglain, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Itu adalah salah satu manfaat dari sebuah teknologi informasi.

Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan salah satunya yang tidak kalah penting yaitu dalam aspek pendidikan. Informasi yang dimaksudkan tentunya termasuk pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi sekolah sampai kemudahan mendapatkan informasi mengenai kelengkapan administrasi peserta didik termasuk informasi keuangan maupun sekedar informasi biodata peserta didik.

Revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi dunia dewasa ini, sebaran jaringan informasi yang tersimpan dalam internet membuktikan bahwa kini dunia kian sempit, tidak ada lagi batas-batas geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Akses ke dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel.

Informasi yang baik tentunya memiliki keakuratan, tidak ambigu mudah dipahami dan mudah didapatkan. Selain itu, informasi yang baik juga harus bersumber pada narasumber yang tepat dan dapat mempertanggung jawabkan mengenai apa yang diinformasikan.

Selama ini proses pemberian informasi sekolah utamanya mengenai kegiatan dan administrasi peserta didik, sebagai contoh apakah peserta didik sudah membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau belum masih kurang responsif, komunikatif maupun interaktif. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi tersebut, orang tua/wali peserta didik harus mendatangi sekolah yang tentunya memakan waktu dan biaya transportasi atau untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, orang tua/wali peserta didik harus menghubungi wali kelas. Tentunya hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan, tidak tersampaikan atau lamanya informasi yang dibutuhkan tersebut sampai ke orang tua/wali peserta didik.

SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dilakukan atau dibayarkan setiap satu bulan sekali, Dengan cara membagikan kartu bayaran untuk penagihan uang SPP setiap bulannya. Informasi yang diberikan wakil kepala sekolah tersebut terbukti kebenarannya. Peneliti juga mewawancarai bagian administrasi tata usaha, staff tata usaha menunjukkan bukti keterlambatan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), jika Sumbangan Pembinaan Pendidikan peserta didik menunggak maka akan berpengaruh pada penghonoran guru, terbukti ketika pandemic covid 19 pada tahun 2020, sejumlah peserta didik menunggak pembayaran sehingga berpengaruh kepada penghonoran guru.

Hal menunjukkan bahwa ekonomi orang tua peserta didik / wali peserta didik sangat tidak memungkinkan untuk membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), Karena kurangnya kesadaran Orang tua/wali peserta didik untuk

melunasi biaya pendidikan masih kurang, dan menjadi masalah untuk kedepannya, ternyata sampai saat ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa Putus Sekolah 2021

No	Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah
	Jumlah	59.674	26.614	84.288
1	SD	36.524	7.992	44.516
2	SMP	6.933	4.445	11.378
3	SMA	9.640	4.239	13.879
4	SMK	6.337	7.614	13.951
5	SLB	240	324	564

Sumber : Kemdikbud, diolah Bang Imam Berbagi, 2021

Seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, sebanyak 84.288 peserta didik menjadi peserta didik drop out atau putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah peserta didik putus sekolah pada jenjang SD sebanyak 44.516 peserta didik atau sekitar (52,81%), Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SMP sebanyak 11.378 peserta didik atau sekitar (13,49%), Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SMA sebanyak 13.879 peserta didik atau sekitar (16,46%), Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SMK sebanyak 13.951 peserta didik atau sekitar (16,55%), dan Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SLB yang putus sekolah sebanyak 564 anak atau sekitar (0,69%). Bila didasarkan pada perhitungan peserta didik putus sekolah berdasar status sekolah.

Pada tahun 2022 terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengembangan perangkat lunak payment remainder di Universitas Bina Dharma membahas mengenai tunggakan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Penelitian ini menghasilkan perangkat lunak Payment Remainder di Perangkat lunak ini dapat membantu pihak dalam mengingatkan mahasiswa akan kewajiban mereka dalam melunasi sisa pembayaran spp. Perangkat lunak ini dapat membantu Pusat Pelayanan Mahasiswa (PPM) mempermudah untuk mengingatkan mahasiswa akan kewajiban mereka.

Teknologi pada zaman ini, berkembang dengan cepat dan pesat dan dapat memberikan dampak positif (baik) dan negatif (buruk) bagi peserta didik. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu peserta didik bisa mengedepankan integritas setiap individu peserta didik dan juga mengasah pola pikir logika demi membangun pendidikan yg mumpuni. Disamping itu dengan berkembangnya teknologi ini kita dapat memperoleh Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses.

Teknologi informasi berkembang semakin pesat, dan mendorong manusia

untuk berlomba memanfaatkan informasi sesuai dengan tujuannya. Teknologi tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi salah satu penentu atas terlaksananya sasaran dan strategi, tidak terkecuali untuk sarana dan strategi pembayaran di sekolah swasta. Dengan memperoleh informasi dan komunikasi kita lebih mudah dan dinamis dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi seperti internet yang menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan dan memanfaatkan teknologi.

Penyampaian informasi pembayaran biaya pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik dilakukan melalui rapat yang diadakan sekolah. Meskipun begitu masih banyak peserta didik yang terlambat atau menunggak membayar biaya pendidikan. Di setiap sekolah menengah swasta mempunyai peraturan yaitu tidak memperbolehkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan ujian lainnya jika belum melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi SPP. Hal ini membuat orang tua / wali peserta didik berbondong – bondong menemui wakil kepala sekolah bidang kepeserta didikan untuk meminta toleransi pengunduran waktu untuk melunasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tersebut.

Notification merupakan pemberitahuan yang dapat dikirim ke pengguna, dalam ilmu komputer terdapat sebuah teknologi notification pemberitahuan atau push notification. Push notification adalah pemberitahuan atau pesan yang secara otomatis dikirimkan dari server aplikasi atau situs web ke perangkat pengguna (seperti smartphone, ipad atau komputer) tanpa perlu pengguna membuka aplikasi atau situs tersebut. Push notification digunakan untuk memberi tahu pengguna tentang informasi baru, peristiwa penting sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna. Push notification biasanya termasuk pemberitahuan pesan teks, pembaruan berita, atau notifikasi media sosial.

Push notification dapat dinilai sangat praktis dan cepat dalam menyampaikan pesan. Dalam sebuah kutipan laporan berjudul Profil Internet Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 210 juta penduduk indonesia yang terdata pada tahun 2021 sampai 2022 sudah terkoneksi dengan internet. Laporan AAJI menunjukkan tingkat pengguna internet pada periode 2021-2022 mencapai 77,02%. Dengan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sangat banyak pengguna internet dalam dunia.

Untuk perbandingan, pada 2018 tingkat pengguna internet sekitar 64,80 %, dan pada 2019-2020 sekitar 73,70%. Jadi sedang apapun bahkan ketika tidak membuka handphone sekalipun push notification akan tetap masuk, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, Push

Notification ini dapat digunakan untuk menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah diatas yaitu dengan fasilitas Push Notification ini, orang tua/wali peserta didik dapat mengetahui informasi perihal pembayaran biaya pendidikan dengan cepat dan efektif.

Diusulkan sebuah teknologi Push Notification untuk sebagai pemanggilan dari server dengan client (Orang tua peserta didik) sebagai pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Teknologi ini sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu belum efektifnya informasi yang diberikan mengenai SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) serta dapat mendukung kinerja dari administrasi pembayaran biaya pendidikan di sekolah.

Pemberitahuan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan dibangun dengan menggunakan Push Notification, mengingatkan orang tua/wali peserta didik perihal tunggakan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas Push Notification. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model waterfall untuk pengembangannya yang meliputi empat tahap yaitu analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Push Notification. Kemudian ada juga teknologi yang digunakan yaitu push notification. Push notification adalah pesan yang muncul pada perangkat pengguna baik dipicu dari 2ance dari aplikasi maupun dorongan (pushed) pesan dari server ke pengguna waaupun aplikasi sedang tidak berjalan ketika terdapat data baru pada server. Teknologi push notificatiion mengijinkan pihak ketiga untuk mengirimkan data secara efektif ke aplikasi yang terdaftar pada server (Vlewin Efendy, Kristian Adi Nugraha, Danny Sebastian, 2019). Secara garis besar push notification bekerja dengan cara Pengguna mengunduh dan menginstal aplikasi di perangkat mereka, Aplikasi mengirimkan permintaan ke server notifikasi, meminta izin untuk mengirim push notification, Server notifikasi menyimpan token perangkat yang unik untuk perangkat pengguna, Ketika ada informasi baru atau peristiwa penting dalam aplikasi, server notifikasi mengirim pesan ke token perangkat yang sesuai. Perangkat penerima menerima pesan push notification dan menampilkan pemberitahuan kepada pengguna, bahkan jika aplikasi tidak aktif.

Berdasarkan fenomena fenomena tersebut, dan didasari pada keinginan pemecahan permasalahan. Maka diharapkan judul penelitian ini yaitu “Penerapan Push Notification Untuk Pemberitahuan Pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)”.

B. Permasalahan

Sekolah sebagai suatu institusi atau instansi pendidikan yang bersifat formal yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran belajar mengajar. Sekolah menjadi ladang pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menambah wawasan dan pengetahuan para peserta didiknya. Pendidikan yang diajarkan berupa pelajaran mengenai pengetahuan umum, keterampilan, maupun pengembangan sikap dan karakter anak (Suhartono.2011). Sekolah juga sebagai salah satu institusi Pendidikan tentu memiliki kewenangan sebagai tempat mendidik dan mengatur segala kegiatan peserta didiknya di sekolah. Demikian pula mengenai kegiatan sampai administrasi peserta didik di sekolah pun perlu disampaikan kepada orang tua atau wali peserta didik sebagai informasi juga sebagai kontroling para orang tua/ wali terhadap putra/putrinya di sekolah.

Proses penyampaian informasi mengenai pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan peserta didik kepada orang tua atau wali peserta didik selama dilakukan oleh pihak sekolah yaitu melalui rapat dan menyebarkan surat pemberitahuan kepada peserta didik. Sumbangan Pembinaan Pendidikan peserta didik di sekolah menengah swasta sangat berpengaruh terhadap aktivitas sekolah termasuk honor guru. Penyampaian informasi pembayaran biaya pendidikan kepada orang tua atau wali peserta didik dilakukan melalui rapat yang diadakan sekolah. Meskipun begitu masih banyak peserta didik yang terlambat membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

Model sistem ini menggunakan teknologi Push Notification sistem untuk pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Gambaran teknologi Push Notification ini digunakan untuk membantu pihak sekolah untuk memberikan Push Notification pembayaran keuangan peserta didik kepada orang tua atau wali peserta didik tersebut. Dengan adanya metode ini maka model pengembangan sistem keuangan dapat membantu para orang tua atau wali peserta didik untuk mendapatkan pemberitahuan yang secara tepat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di sekolah mengenai informasi pembayaran keuangan peserta didik adalah masih kurang cepat, kurang efektif, kurang komunikatif, kurang interaktif dan kurang responsif untuk didapatkan oleh orang tua atau wali peserta didik. Hal ini dikarenakan media penyampaian informasi sekolah mengenai pemberitahuan keuangan peserta didik masih kurang dimengerti oleh orang tua atau wali peserta didik dan dikhususkan guna mengatasi permasalahan tersebut, guna mendapatkan informasi yang akurat. Berikut adalah permasalahan tunggakan peserta didik:

Tabel 1. 1 Data Tunggalan SPP Siswa Tahun 2022

No	Kelas	Jurusan	Jumlah Peserta didik	Jumlah Tunggalan
1	X	Teknik Komputer dan Jaringan	25	Rp 10,000,000
2	X	Multimedia A	32	Rp 25,780,000
3	X	Multimedia B	33	Rp 25,760,000
4	X	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran A	30	Rp 14,900,000
5	X	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran B	30	Rp 16,760,000
6	XI	Teknik Komputer dan Jaringan	32	Rp 23,000,000
7	XI	Multimedia A	30	Rp 32,000,000
8	XI	Multimedia B	29	Rp 24,980,000
9	XI	Multimedia C	29	Rp 23,780,000
10	XI	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran A	25	Rp 34,500,000
11	XI	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran B	25	Rp 27,760,000
12	XII	Teknik Komputer dan Jaringan	17	Rp 25,000,000
13	XII	Multimedia A	30	Rp 36,000,000
14	XII	Multimedia B	30	Rp 39,800,000
15	XII	Multimedia C	30	Rp 35,400,000
16	XII	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran A	25	Rp 21,500,000
17	XII	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran B	30	Rp 24,200,000
TOTAL			482	Rp 441,120,000

Dengan kurangnya informasi mengenai pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik yang harus disampaikan tentunya menyebabkan kesulitan bagi pihak sekolah dalam menyampaikan informasi tersebut secara optimal. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi agar informasi

yang akan disampaikan dan yang akan diterima dapat termanajemen dengan lebih baik, cepat dan tepat.

1. Identifikasi masalah :

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah bahwa:

- (a) Belum tertatanya proses pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
- (b) Belum efektif proses pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat ditetapkan pernyataan masalah dan pertanyaan sebagai berikut:

a. Pernyataan Masalah / Problem Statement

Permasalahan - permasalahan yang terjadi disebabkan karena belum efektifnya proses pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

b. Pertanyaan Masalah

Bagaimana Penerapan Push Notification Untuk pemberitahuan Pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)?

C. Maksud dan tujuan penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan konsep teknologi Push Notification untuk optimasi sistem pemberitahuan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan melalui aplikasi agar dapat diperoleh informasi yang lebih cepat dan efektif..

2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini diantaranya :

- (a) Memperoleh pemberitahuan dalam memberikan informasi pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang efektif.
- (b) Mendapatkan sistem pemberitahuan informasi pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang optimal.
- (c) Mengembangkan sebuah teknologi Push notification untuk memberikan informasi Pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
- (d) Mengukur tingkat optimasi dan efektifitas penerapan teknologi Push

Notification untuk optimasi informasi pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

D. Spesifikasi produk yang diharapkan

Spesifikasi produk yang diharapkan peneliti antara lain :

- (a) Mendapatkan konstruksi sistem komunikasi informasi yang optimal untuk penyampaian informasi mengenai pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik sekolah.
- (b) Mendapatkan proses penyampaian informasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang lebih efektif.

E. Signifikansi penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan penerapan Teknik komputasi pemodelan Push Notification untuk optimasi sistem pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Dimana data yang terdapat pada database akan diolah sedemikian rupa melalui Push Notification sehingga menjadi sebuah aplikasi pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk membeikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan teknologi Push Notification sehingga menjadi sebuah reminder sistem.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan pihak sekolah sebagai pemberi informasi kepada orang tua / wali peserta didik dan orang tua / wali peserta didik sebagai penerima informasi pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sehingga informasi yang akan diberikan lebih efektif dan diterima menjadi informasi yang lebih cepat dan tepat tanpa mengeluarkan banyak waktu dan materi.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan sekolah oleh pengelola sekolah.

F. Asumsi dan keterbatasan

Berikut Asumsi dan Keterbatasan pada penelitian ini yaitu meliputi :

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian yang akan dikembangkan yaitu :

Penelitian ini harus dilakukan dengan teknologi push notification dan protokol

SMTP untuk dapat mengirimkan notifikasi pemberitahuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini , Pengembangan sistem yang dikembangkan ini terdapat keterbatasan yaitu :

Aplikasi ini tidak dapat menampilkan jumlah nominal yang harus dibayarkan orang tua peserta didik kepada sekolah.

G. Definisi istilah dan definisi operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian:

1. SPP = SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali. SPP merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap peserta didik yang masih aktif disekolah tersebut.
2. Pembayaran = Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*)
3. Informasi = Data yang diproses menjadi bentuk yang berguna dan bermakna bagi penerima maupun pengguna informasi. Dalam konteks komunikasi , informasi dapat berupa pesan atau pesan teks, suara, gambar, atau video yang ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain. Informasi juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, atau penelitian yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah